

ARTIKEL

**SILVANA BASALA / 080 314 062
JURUSAN SOSIAL EKONOMI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

ABSTRACT

Silvana Basala. Society assessment of Buyat Village farmer to the Public Service performance of Agriculture Department East Bolaang regency Mongondow under the guidance of O.Esry H. Laoh as chairman Ir. Juliana R.Mandei and Celsius Talumingan as a member.

The objective of the study to examine the assessment of the farmers in the village of Buyat on the performance of public services Agriculture Department East BolaangMongondow East Regency.

The data used are primary data and secondary data, primary data obtained from the farmers in the village of Buyat and secondary data obtained from agencies or related agencies. Data was collected through direct interviews with the farmers in the village of Buyat. The method of data analysis is descriptive analysis method presented in tabular form by calculating the results of the assessment every farm community based services and calculate the results average value of each element of service.

Based Assessment of the Farmers in the village of Buyat on the performance of the public Department of agriculture Easr Bolaang Mongondow regency, it can be categorized as either. However, there ara still some elements that are not goo.

From both these results indicate that the public service provided by the Department of Agriculture Regional BolaangMongondow East Government can be said to have a poor public services. Therefore, it is expected that the Department of Agriculture Regional BolaangMongondow East Government to improve the performance of services to the farming community as well as to pay attention to the needs of the farmers, and can accept input from a farm community, whether it be information, advice, opinions, responses, and or complaints.

These things should be followed up with efforts to improve the Department of Agriculture service to the farming community. Given that often a time there is a difference between the aspirations of the farmers and the government. And too

often there is a difference of interpretation about the success of a program run by the government. On the other side often it is assessment that the program is success, by the government but the reality on the ground is not like what the government hopes.

ABSTRAK

Silvana Basala. Penilaian Masyarakat Tani di Desa Buyat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di bawah bimbingan O. Esry H. Laoh sebagai ketua Juliana R. Mandei dan Celcius Talumingan sebagai anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penilaian masyarakat tani yang berada di Desa Buyat terhadap kinerja pelayanan publik Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder data primer di peroleh dari masyarakat petani yang berada di Desa Buyat dan data sekunder diperoleh dari instansi atau Dinas terkait, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat petani di Desa Buyat, dan jumlah responden berjumlah 38 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan masyarakat tani yang berada di Desa Buyat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel dengan menghitung hasil penilaian setiap masyarakat tani berdasarkan perunsur pelayanan serta menghitung hasil nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan.

Berdasarkan Penilaian Masyarakat petani Di Desa Buyat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pertanian Bolaang Mongondow Timur, dapat dikategorikan baik. Namun, masih ada beberapa unsur yang masih kurang baik.

Diharapkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan poin-poin penilaian yang dianggap kurang bagi masyarakat, serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tani, menerima masukan-masukan dari masyarakat tani, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan, dan ataupun pengaduan.

Hal-hal tersebut hendaknya dapat di tindak lanjuti dengan langkah-langkah upaya perbaikan pelayanan, serta meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian kepada masyarakat tani. mengingat bahwa sering kali terjadi perbedaan aspirasi antara masyarakat tani dan pemerintah dan sering kali terjadi perbedaan penafsiran akan keberhasilan suatu program yang dijalankan oleh pemerintah. Karena mengingat di sisi lain sering kali pemerintah menganggap telah berhasil tetapi kenyataan di

lapangan tidak seperti harapan pemerintah berupa suatu keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia, seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara.

Pelayanan yang berkualitas adalah harapan yang di dambakan masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa hal itu adalah merupakan hak yang harus diperolehnya (Surjadi 2009).

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan akan kebutuhan masyarakat tani. Administrasi yang baik akan menjamin lancarnya hubungan antara pemerintah dengan petani, pedagang, dan unsur lain dalam masyarakat. Hal pokok dalam administrasi pemerintah dalam bidang pertanian adalah adanya koordinasi sebagai upaya untuk melayani berbagai keperluan para petani yang bermacam-macam.

Daerah Bolaang Mongondow Timur adalah salah satu daerah pemekaran dari beberapa daerah pemekaran lainnya pada saat ini. Pemekaran Daerah Bolaang Mongondow Timur dari tahun ketahun dapat dikatakan memiliki kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya pemekaran pada tahun 2009. Namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya perkembangan di Daerah Bolaang Mongondow Timur sudah dikatakan sebagai pelayanan publik yang prima/baik khususnya pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat tani.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penilaian masyarakat tani yang berada di Desa Buyat terhadap kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pertanian yang berada di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penilaian masyarakat tani yang berada di Desa Buyat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Adapun manfaat penelitian adalah untuk dapat mengkaji serta mengetahui kinerja aparatur pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tani, serta dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah khususnya di Dinas Pertanian yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap kinerja pelayanan publik Dinas Pertanian kepada masyarakat tani, dan sebagai bahan evaluasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat tani, menangani permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam masyarakat tani serta dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa khususnya penulis akan pentingnya pelayanan publik guna untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan orang banyak dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat tani.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Penilaian

Penilaian merupakan suatu tanggapan atau hasil keputusan yang diperoleh dari seseorang atau masyarakat yang memberikan penilaian terhadap suatu kinerja atau kegiatan yang telah direncanakan dan dijalankan (Djemari Mardapi (1999:8) Anonim 2012).

2.2 Konsep Masyarakat Petani

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.

Petani merupakan industry primer yang mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air, mineral, serta modal dalam berbagai bentuk, pengelolaan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang diperlukan oleh manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa, masyarakat tani adalah masyarakat yang menekuni pekerjaannya di bidang pertanian guna untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat memproduksi berbagai barang yang diperkan oleh orang banyak/masyarakat (Hanafie 2010).

2.3 Konsep Desa

Istilah Desa seperti yang dikemukakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yakni Undang-Undang tentang pemerintah Desa, maka istilah "Desa" menjadi seragam untuk wilayah tanah air Indonesia. Jadi desa telah menjadi istilah nasional, untuk menunjukkan "kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Pasal 1 huruf a, UU No.5 Tahun 1979 dalam Asyari 1993).

2.4 Konsep Pelayanan Publik

Segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan publik maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Surjadi 2009).

2.4.1 Tujuan Pelayanan Publik

Tujuan dari pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Surjadi 2009).

2.4.2 Manfaat Pelayanan Publik

Manfaat dari pelayanan publik meliputi kemaslahatan bagi masyarakat baik yang menyangkut kepentingan masyarakat maupun memecahkan masalah-masalah masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh (Irfan Islamy 2002:21 dalam Surjadi) bahwa tugas administrator publik bukan membuat kebijaksanaan negara atas nama kepentingan publik tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

2.5 Konsep Pemerintah Daerah

Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah maka yang dimaksud ialah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 (Sunarno 2009).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Mengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil melalui wawancara langsung pada responden (masyarakat tani). data sekunder diperoleh melalui instansi dan dinas terkait.

3.2 Metode penentuan sampel

Yaitu dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang di tentukan secara sengaja untuk dijadikan Daerah sampel yang disesuaikan dengan cakupan wilayah.

3.3 Definisi Pengukuran Variabel

Variable yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:

1. Karakteristik responden
 - a. Umur
 - b. Pendidikan
 - c. Jenis kelamin
 - d. Pekerjaan sampingan
2. Untuk melihat indikator penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik dapat menggunakan 14 indikator berikut:
 - a. Prosedur pelayanan
 - b. Persyaratan pelayanan
 - c. Kejelasan petugas pelayanan
 - d. Kedisiplinan petugas pelayanan
 - e. Tanggung jawab petugas pelayanan
 - f. Kemampuan petugas pelayanan
 - g. Kecepatan pelayanan
 - h. Keadilan mendapatkan pelayanan
 - i. Kesopanan dan keramahan petugas
 - j. Kewajaran biaya pelayanan

- k. Kepastian biaya pelayanan
- l. Kepastian jadwal pelayanan
- m. Kenyamanan lingkungan
- n. Keamanan lingkungan

3.4 Model Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Untuk menghitung indeks kepuasan masyarakat dapat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Buyat sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama bulan juni sampai agustus 2012.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah

4.1.1 Keadaan Geografis

Desa Buyat adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas wilayah 65.000 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Buyat sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Desa Bukaka
- Sebelah Timur : Laut Maluku
- Sebelah Utara : Minahasa Tenggara
- Sebelah selatan : Desa Bulawan

4.1.2 Keadaan Demografis

Data demografis Desa Buyat pada tahun 2011 memperlihatkan jumlah penduduk sebanyak 3.831 jiwa yang terdiri dari 1.036 kepala keluarga (KK) dimana 1999 jumlah penduduk laki-laki dan 1832 jumlah penduduk perempuan yang tersebar di masing-masing lingkungan.

a. Mata Pencarian

Sebagian besar penduduk Desa Buyat berprofesi sebagai petani. Selain petani terdapat juga penduduk yang berprofesi sebagai PNS, TNI/POLRI, Wiraswasta/Usahawan, Buruh, Nelayan, dll.

a. Tingkat pendidikan

Pendidikan memegang peran penting dalam usaha menciptakan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan produktifitas kerja, sifat, sikap serta kemampuan seseorang untuk berfikir. Tingkat pendidikan yang berada di Desa Buyat sudah cukup baik, karena sebagian besar

masyarakat sudah mulai menyadari begitu pentingnya pendidikan pada masa sekarang dan pada masa akan datang.

4.2 Karakteristik Responden

4.2.1 Umur Responden

Umur merupakan karakteristik yang sangat mempengaruhi tingkat penilaian petani terhadap kinerja pelayanan publik Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. masyarakat tani yang berumur 50 tahun keatas lebih banyak memiliki pengalaman dibandingkan dengan petani yang masih dibawah 50 tahun. Jumlah responden yang berumur 21-49 terdapat 24 orang (63,15%) dan jumlah responden yang berumur 50-78 tahun terdapat 14 orang (36,85%)

4.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan proses belajar yang dapat menunjukkan pola pikir yang positif. Peran pendidikan dalam usaha peningkatan kualitas penduduk dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pada saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan responden bervariasi mulai dari tingkat Sekolah SD, SMP, SMA/SLTA.

4.3 Kinerja Aparatu Pemerintah Dinas Pertanian dilihat dari penilaian masyarakat melalui 14 unsur criteria penilaian

1. Prosedur pelayanan

Pengadaan prosedur pelayanan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pelayanan. Namun, kesulitan dan kemudahan prosedur pelayanan dapat merubah pola pikir atau penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dari hasil penelitian ternyata masyarakat menilai bahwa prosedur pelayanan Dinas Pertanian BOLTIM tergolong pada kategori kurang mudah dan mudah. Dimana, 16 responden menyatakan kurang mudah dan 16 responden yang lainnya juga memilih muda.

2. Persyaratan pelayanan

Persyaratan yang telah ditetapkan dalam pemberian pelayanan merupakan salah satu prosedur administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan

pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari hasil penelitian ternyata sebagian besar masyarakat atau 52,64% masyarakat menilai bahwa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

3. Kejelasan petugas pelayanan

Kejelasan dan kepastian petugas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan. Dari hasil penelitian ternyata 47,37% responden menyatakan bahwa adanya kejelasan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tani.

4. Kedisiplinan petugas pelayanan

Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan dibutuhkan kedisiplinan, agar pelayanan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal/waktu yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian 60,53% responden menilai bahwa petugas yang memberikan pelayanan tergolong pada kategori disiplin.

5. Tanggung jawab petugas pelayanan

Tanggung jawab merupakan salah satu faktor terpenting dalam melaksanakan segala sesuatu baik menyangkut kepentingan orang banyak maupun menyangkut kepentingan pribadi. Dari hasil penelitian ternyata 47,37% responden menyatakan bahwa petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tani termasuk pada kategori bertanggung jawab.

6. Kemampuan petugas pelayanan

Aparatur pemerintah yang profesional adalah aparatur yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan mendasarkan pada etik profesi. Kemampuan dan keahlian petugas sangatlah perlu diperhatikan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dari hasil penelitian ternyata 78,95% responden menilai bahwa petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tani tergolong pada kategori mampu.

7. Kecepatan pelayanan

Kecepatan pemberi layanan dalam melaksanakan pelayanan merupakan hal yang paling di harapkan oleh penerima layanan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 50,00% responden menilai bahwa kecepatan pelayanan tergolong pada kategori kurang cepat.

8. Keadilan mendapatkan pelayanan

Keadilan dan tidak membeda-bedakan masyarakat serta jujur dan terbuka dalam pelaksanaan pelayanan merupakan hal yang diinginkan dan diharapkan oleh semua orang. Dari hasil penelitian ternyata 47,37% responden menilai bahwa keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang di berikan oleh Dinas Pertanian kepada masyarakat tani tergolong pada kategori adil.

9. Kesopanan dan keramahan petugas

Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tani merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dari hasil penelitian ternyata 89,48% responden menilai bahwa kesopanan dan keramahan petugas Dinas Pertanian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tani tergolong pada kategori sopan dan ramah.

10. Kewajaran biaya pelayanan

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rincian dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran atau tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ternyata 55,26% responden menilai bahwakewajaran biaya pelayanan yang di tetapkan untuk mendapatkan pelayanan dari Dinas Pertanian tergolong pada kategori wajar.

11. Kepastian biaya pelayanan

Berbicara tentang biaya sering kali terjadi perbedaan penafsiran terhadap kepastian biaya-biaya yang telah ditetapkan dengan biaya yang akan di bayar untuk mendapatkan pelayanan. Dari hasil penelitian ternyata 47,37% responden menilai bahwa kepastian biaya untuk mendapatkan pelayanan dari Dinas Pertanian tergolong masih sesuai.

12. Kepastian jadwal pelayanan

waktu kepastian jadwal pelayanan adalah jangka waktu pelaksanaan pelayanan mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis atau persyaratan administrasi samapi dengan selesainya proses pelayanan tersebut yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penelitian ternyata 55,26% responden menilai bahwa kepastian jadwal untuk mendapatkan pelayanan tergolong pada kategori kadang-kadang tepat waktu.

13. Kenyamanan lingkungan

Tempat dan lokasi penyelenggaraan pelayanan hendaknya memiliki kenyamanan bagi penerima layanan, agar penerima layanan dapat menerima layanan dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi layanan. Dari hasil penelitian ternyata 86,84% responden menilai bahwa kenyamanan lingkungan untuk mendapatkan pelayanan tergolong pada kategori nyaman.

14. Keamanan lingkungan

Keamanan lingkungan dalam pelaksanaan pelayanan perlu diperhatikan. Agar, dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menerima pelayanan merasa aman selama pelayanan berlangsung. Dari hasil penelitian ternyata, 92,10% responden menilai bahwa keamanan lingkungan dalam pelaksanaan pelayanan termasuk pada kategori aman.

4.4 Nilai Rata-Rata Perunsur Pelayanan

Dari 14 unsur pelayanan yang dinilai terdapat 9 unsur kinerja pelayanan publik yang kurang baik dan 5 unsur pelayanan publik tergolong pada kategori baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Penilaian Masyarakat Tani Di Desa Buyat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dinas pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dapat disimpulkan bahwa terdapat Sembilan unsur pelayanan publik yang menunjukkan kinerja pelayanan publik memiliki pelayanan publik yang kurang baik.

Sedangkan lima unsur pelayanan publik lainnya menunjukkan kinerja pelayanan publik yang baik. Dari kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikatakan pelayanan publik yang kurang baik.

5.2 Saran

Diharapkan kepada Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat tani serta dapat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tani, dan dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat tani, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan, dan ataupun pengaduan.

Hal-hal tersebut hendaknya dapat di tindak lanjuti dengan langkah-langkah upaya perbaikan, serta meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian kepada masyarakat tani. Mengingat bahwa sering kali terjadi perbedaan aspirasi antara masyarakat tani dan pemerintah. Dan juga sering kali terjadi perbedaan penafsiran akan keberhasilan suatu program yang dijalankan oleh pemerintah. Karena mengingat di sisi lain sering kali pemerintah menganggap telah berhasil tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti harapan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. <http://definisidanpengertian.blogspot.com/2011/02/pengertian-kuesioner.html> diakses 21 Mei 2012
- Anonim, 2008. Pengukuran Variabel Dalam Penelitian Dihin Septyanto, SE, ME
<http://pascasarjana.esaunggul.ac.id/2008/07/31/index.php?option=comcontent&view=article&id=127:pengukuran-variabel-dalam-penelitian&catid=57:artikel&itemid=80> diakses 1 mei 2012
- Anonim, 2009. <http://santriw4n.wordpress.com/2009/11/18/pengertian-dan-konsep-evaluasi-penilaian-dan-pengukuran/> di akses pada tanggal 1 Agustus 2012
- Anonim, 2009. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pendidikan> diakses pada tanggal 1 Agustus 2012
- Hanafie, R. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Henry, N. 2000. Public Administration and Public Affairs dalam Surjadi 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. PT Refika Aditama. Bandung
- Lubis, 2007. Kebijakan Publik. CV Mandar Maju. Bandung
- Purbopranoto, 2007. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan administrasi negara dalam solly 2007.
- Reksohadiprodjo, 2001. Ekonomika Publik Edisi Pertama. PT BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta
- Wasistiono dan Tahir, 2007. Prospek Pengembangan Desa. Penerbit CV. FOKUS MEDIA. Bandung
- Sunarno, S. 2009. Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Surjadi, 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. PT Refika Aditama. Bandung
- Wibawa, S. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. graham Ilmu. Yogyakarta
- Winarno, B. 2008. GLOBALISASI Peluang atau Ancaman bagi INDONESIA. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Asyari, S. 1993. Sosiologi kota dan desa. USAHA NASIONAL. Surabaya-Indonesia
- Shadily, H. 1993. Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. PT RINEKA CIPTA. Jakarta